

ANALISIS IMPLEMENTASI PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN DONGGALA

Dwi Sapto Ranusentika¹; Andi Mattulada Amir dan H. Moh Ikbal A²

¹Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

²Dosen Pengajar Program Studi Magister Manajemen Universitas Tadulako

Abstract

This research is aimed to seek and analyze: 1) the implementation of regional's assets reporting in Donggala Regency; 2) factors that impede the implementation of regional assets reporting in Donggala Regency. Type of the research is descriptive qualitative and its population consists of 58 governmental institution units that manage the regional assets in Donggala Regency. The research applies census-sampling technique by which all population selected as respondents. The results show that : 1) the implementation of regional's assets reporting in Donggala Regency from various dimensions such as communications, resource, and bureaucratic structure has not been implemented properly, but disposition; 2) factors that impede the implementation of regional assets reporting in Donggala regency include low-skilled human resources in using SIMDA BMD and lack of standardized administrative supporting facilities such as computers that can contribute to reporting system inefficiency.

Keywords: Asset reporting, regional assets

Berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007, menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah dalam pelaporannya harus dikelola dengan baik dan benar, dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut: 1) Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pelaporan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh pengelola barang, 2) Azas kepastian hukum, yaitu pelaporan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, 3) Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pelaporan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, 4) Azas efisiensi, yaitu pelaporan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan, 5) Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pelaporan barang milik daerah harus dapat di pertanggungjawabkan kepada rakyat dan 6) Azas kepastian nilai, yaitu pelaporan barang milik daerah harus didukung oleh adanya

ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan APBD dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, didalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan. meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN/D yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi

dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkaian pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan. Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang

Sistem pelaporan barang milik daerah dimulai dengan dimana Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.dengan termuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, Edan F, selanjutnya Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah. Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan. Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah.

Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah. Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.. Sensus barang milik daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus. Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah. Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan

Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang. Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah yang dapat disampaikan secara berjenjang sehingga dapat memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dapat dijadikan Pedoman Pelaporan Barang Daerah guna menghasilkan informasi (output) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, serta dapat menghasilkan laporan barang dan informasi kondisi barang daerah secara lebih komprehensif guna membantu pelaporan barang daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun di tingkat SKPD (entitas akuntansi). Adanya program aplikasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih kepada PEMDA dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala memerlukan sistem yang dapat diandalkan dalam menginput penataan usaha barang milik daerah terutama pada aspek pelaporan kondisi barang baik yang ada maupun yang sudah digunakan dan yang

sudah terhapus, informasi tersebut dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, serta dapat menghasilkan laporan barang milik daerah dan informasi barang milik daerah lainnya secara lebih komprehensif, disebabkan karena sebelum diterapkannya Program Aplikasi Komputer SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah). Namun keberadaan sistem ini dinilai belum efisien dan efektif karena tidak dapat menyajikan laporan barang daerah secara utuh (*komprehensif*), misalnya pelaporan barang milik daerah Kabupaten Donggala yang digunakan selama ini masih dikerjakan secara manual sehingga laporan barang milik daerah Kabupaten Donggala rentan manipulative.

Masalah yang ditemui pada pelaporan barang milik daerah Kabupaten Donggala, terlihat jelas di lokasi penelitian, dimana belum terdatanya aset daerah Kabupaten Donggala secara sistimatis disetiap SKPD maupun pada unit kerja lainnya dilingkungan Kabupaten Donggala, belum adanya bank data aset daerah. Karena kesemrawutan data tersebut menyebabkan dalam laporan barang milik daerah Kabupaten Donggala tidak menggambarkan kondisi barang sekarang, yang terlihat laporan tersebut tidak mengalami perubahan data 5 tahun terakhir, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kebenaran laporan tersebut .(Hasil observasi dan studi dokumen, tanggal 2 Januari 2015).

METODE

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2007:11). Suatu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah di Kabupaten Donggala.

Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:72).

Berdasarkan acuan di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.(SKPD) di Kabupaten Donggala Pengguna Barang Milik Daerah dalam lingkup SKPD di Kabupaten Donggala.

Berdasarkan jumlah target populasi tersebut di atas dan mempertimbangkan kerepresentatifan hasil penelitian maka digunakan metode sensus dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel pada penelitian ini dan kemudian menjadi responden penelitian. Menurut Guy dalam Arifin (2007:30), ukuran minimal sampel yang dapat diterima berdasarkan desain penelitian yang digunakan dengan metode *deskriptif-korelasional* minimal sebanyak 30 sampel.

Dasar pertimbangan penulis menetapkan seluruh target populasi sebagai sampel penelitian karena mengetahui bahwa kelima puluh delapan SKPD di atas memiliki kewenangan pengguna aset daerah di Kabupaten Donggala sehingga dinilai representatif sebagai sumber utama data penelitian.

Data dan Pengumpulan Data

1. Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Untuk memperoleh data primer dalam penelitian-ini menggunakan metode survei dengan memberikan kuesioner kepada responden, yaitu pengurus barang SKPD dan dikordinir langsung oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai

penanggung jawab pengguna barang milik daerah di Kabupaten Donggala.

2. Data Sekunder, adalah data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen tentang implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah serta literatur-literatur kepustakaan pendukung lainnya yang dinilai memiliki relevansi pada penelitian ini.

Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan untuk menguji instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas untuk variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai *corrected item-total corrected* diatas 0,30 sehingga dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan kuesioner pada variabel penelitian adalah valid

2. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan semua variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan pada penelitian ini handal.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif
2. Tabel Frekuensi

3. skala Likert

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Hasil Pengujian Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas terhadap kuesioner penelitian dengan menggunakan teknik korelasi moment tangkar, melalui bantuan komputer program statistik SPSS For Wind Release 16.0, dapat diketahui bahwa nilai korelasi dari kesepuluh item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner penelitian valid (sahih) pada tingkat kepercayaan 95% atau penolakan 5%.

Validnya kesepuluh item pertanyaan dalam penelitian ini dapat diketahui dari hasil perbandingan nilai *Corrected Item Total Correlation* (r-hitung) dengan nilai Confidence 95% (r-tabel) Product Moment sebesar 0.30 yang telah ditetapkan sebelumnya, Dimana untuk lebih jelasnya nilai validitas (kesahihan butir) dari kesepuluh item pertanyaan dalam mengukur dan mencerminkan keberadaan dari keempat variabel penelitian pada alat ukur yang digunakan, secara lebih terperinci dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas (Kesahihan Butir) Instrumen Penelitian Pada Tingkat Kepercayaan 95% (α 0.05)

Variabel Penelitian	Pernyataan	r-hitung	r-kritis	Item
Komunikasi (X1)	X _{1.1}	0,469	0,30	Valid
	X _{1.2}	0,469	0,30	Valid
Sumber Daya (X2)	X _{2.1}	,698	0,30	Valid
	X _{2.2}	0,698	0,30	Valid
Disposisi (X3)	X _{3.1}	0,700	0,30	Valid
	X _{3.2}	0,781	0,30	Valid
	X _{3.3}	0,782	0,30	Valid
Struktur Birokrasi (X4)	X _{4.1}	0,715	0,30	Valid
	X _{4.2}	0,790	0,30	Valid
	X _{4.3}	0,795	0,30	Valid

2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan komputer program statistik SPSS For Wind Release 16.0, diperoleh nilai koefisien keandalan untuk keempat variabel penelitian (implementasi

Pelaporan Barang Milik Daerah) yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam kuesioner penelitian dengan hasil seperti terlihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Pengujian Reliabilitas (Kesahihan Butir) Instrumen Penelitian Pada Tingkat Kepercayaan 95% (α 0.05)

Variabel Penelitian	Notasi Variabel	Cronbach's Alpha	Koefisien Alpha	Item
Komunikasi	X ₁	0,638	0,60	Reliabel
Sumber Daya	X ₂	0,822	0,60	Reliabel
Disposisi	X ₃	0,871	0,60	Reliabel
Struktur Birokrasi	X ₄	0,879	0,60	Reliabel

Sumber Data: Lampiran 2.

Hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 4.2. di atas menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini di nilai reliabel (handal) dalam fungsi ukurnya. Hal ini terlihat pada nilai masing-masing variabel penelitian (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi) dalam instrumen penelitian (kuesioner) yang memiliki nilai Alpha Cronbach di atas nilai koefisien alpha toleransi yaitu sebesar 0,60.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dapat dimaknai bahwa instrumen penelitian yang digunakan layak ditindaklanjuti untuk keperluan analisis. Artinya, bila instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan s e c a r a berulang-ulang pada populasi penelitian yang sama maka akan memperoleh hasil pengukuran yang relatif sama atau konsisten selama aspek yang di ukur pada objek penelitian belum mengalami perubahan.

Pembahasan

a. Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah Daerah di Kabupaten Donggala

Berkaitan dengan penelitian ini, untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Donggala, maka akan dianalisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Edward III dan selanjutnya akan dianalisis pula faktor yang menghambat Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Donggala.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, akan didapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai berbagai hal pokok dalam implementasi kebijakan dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Donggala.

Implementasi Kebijakan mempunyai tujuan yaitu: 1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kebijakan; 2) Terwujudnya sistem

penyelenggaraan kebijakan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang baik; 3) Terpenuhinya penyelenggaraan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Donggala sebagai salah satu wilayah Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah berkewajiban menetapkan standar kebijakan publik didalam penataan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Donggala kelolaan keuangan daerah yang menjadi rujukan bagi setiap SKPD dalam lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Donggala dalam meningkatkan penata kelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel sebagai upaya untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Sebagai bentuk implementasi kebijakan publik, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala melalui seluruh SKPD yang ada yang memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran untuk mewujudkan fungsinya sebagai penyedia pelayanan publik yang memenuhi standar melalui berbagai upaya antara lain dengan mengimplementasi sistem Pelaporan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Donggala sesuai aturan yang berlaku dengan mengacu pada sistem penataan pengelolaan keuangan daerah, sebagai upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Untuk menganalisis Sistem implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Donggala, maka akan dianalisis berdasarkan 4 (empat) indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Untuk memudahkan analisis dalam pembahasan ini perlu kami sampaikan parameter yang kami gunakan untuk mengukur indikator dalam kuesioner

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interval dengan asumsi masing-masing yaitu: Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, Tidak Baik, dan Sangat Tidak Baik.

b. Komunikasi.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan sangat dibutuhkan, karna komunikasi merupakan proses yang membuat adanya transfer pengetahuan dari komunikator ke komunikan, Perumusan ini bermaksud bahwa komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang mampu menciptakan kebersamaan arti bagi orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan, tanpa persamaan arti, sukar dipikirkan adanya transfer pengetahuan yang baik. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi dan perasaan di antara dua orang atau lebih guna menciptakan perasaan art pada akhirnya akan mampu mempengaruhi serta merubah sikap dan tingkah laku seseorang. Komunikasi akan efektif jika menciptakan kebersamaan arti bagi orang-orang yang terlibat.

implementasi kebijakan pelaporan barang milik daerah di Kabupaten Donggala kurang berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan pagu anggaran tentang sosialisasi kebijakan pelaporan barang milik daerah tidak ada, sehingga ada ketakutan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Donggala untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena kegiatan sosialisasi tersebut tidak diprogramkan disetiap SKPD, walaupun sangat disadari bahwa sosialisasi kebijakan tersebut sangat dibutuhkan, namun tidak dapat dilaksanakan karena apabila dilaksanakan kemungkinan besar akan berhadapan dengan sanksi pidana. Sosialisasi yang kurang dilaksanakan, membuat dapat member kontribusi pada tingkat pemahaman pengelola barang milik daerah terutama aspek pelaporannya.

c. Sumberdaya.

Sumber daya pelaksana mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Walaupun suatu kebijakan publik itu sudah baik akan tetapi kalau tidak ditunjang oleh sumber daya pelaksana kebijakan yang berkualitas maka mustahil kebijakan tersebut akan berhasil maksimal.

Sumber daya pengelola barang milik daerah di Kabupaten Donggala dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan dan pengalamannya, dari kemampuan teknis yang dimiliki, dan upaya pelaksana meningkatkan kemampuannya. Oleh karena itu untuk melihat hasil jawaban responden tentang sumber daya dalam implementasi pelaporan barang milik daerah di Kabupaten Donggala, maka berikut ini dikemukakan tanggapan responden tentang keterampilan staff dalam melaksanakan implementasi pelaporan barang milik daerah dengan menggunakan SIMDA BMD di SKPD Kabupaten Donggala.

d. Disposisi.

Disposisi lebih diarahkan pada komitmen dan kejujuran petugas dalam melaksanakan pekerjaannya. Komitmen dan kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan pelaporan barang milik daerah di SKPD dalam lingkungan Kabupaten Donggala, merupakan gambaran sikap aparatur Negara dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi implementasi Sistem pelaporan barang milik daerah di Kabupaten Donggala. Pelaksana kebijakan yang mempunyai kesepakatan untuk mematuhi aturan dan berupaya untuk mematuhi aturan tersebut akan menjadikan suatu kebijakan publik berhasil diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.

Faktor ini cukup diperhitungkan mengingat bahwa seorang aparatur pemerintah harus memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pimpinan instansi. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil maka para aparatur pemerintah tidak hanya mengetahui apa yang semestinya dilakukan, akan tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pada kenyataannya, kebanyakan para aparatur pemerintah tidak dapat mengimplementasikan kebijakan dengan leluasa karena adanya ketergantungan pada pimpinan yang merumuskan kebijakan.

Untuk mengetahui komitmen semua pejabat struktural dan staf dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bentuk dukungan pada keberhasilan implementasi Siste pelaporan barang milik daerah di Kabupaten Donggala, maka berikut ini akan dipaparkan hasil distribusi tanggapan responden tentang kepuasan peengelola barang milik daerah dalam membuat laporan barang milik daerah dengan menggunakan SIMDA BMD. Maka dapat disimpulkan bahwa pegawai memiliki sikap yang baik terhadap kebijakan SIMDA BMD di SKPD Kabupaten Donggala, yang ditunjukkan dengan adanya komitmen mereka untuk mendukung implementasi pelaporan barang milik daerah dengan menggunakan SIMDA BMD karena dengan pengaplikasian SIMDA BMD dalam pelaporan barang milik daerah akan terlihat bahwa kinerja penata kelolaan barang milik daerah dari tahun ke tahun semakin membaik sehingga tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala untuk mewujudkan penata kelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel akan dapat tercapai dengan efisien, efektif dan optimal.

e. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi diartikan sebagai yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi standar (standard operating procedure

atau SOP). Standar operating procedure menjadi pedoman bagi implementator dalam bertindak. Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya, adanya komunikasi yang baik dan adanya kemauan dari para pelaksana kebijakan akan tetapi juga ditentukan oleh adanya pembagian tugas yang jelas dalam struktur birokrasi.

penerapan administrasi pelaporan barang milik daerah dengan menggunakan standar yang ditentukan yaitu dengan SIMDA BMD belum digunakan pada seluruh pengelola barang milik daerah pada SKPD dalam lingkungan Kabupaten Donggala.

Hal ini memberikan makna bahwa proses sistem manajemen pelaporan barang milik daerah Kabupaten Donggala belum mampu menertibkan sistem administrasi pengelolaan atau pelaporan barang milik daerah pada setiap SKPD di Kabupaten Donggala yang memiliki kewenangan mengelola barang milik daerah di kabupaten Donggala.

f. Faktor yang menghambat Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah di Kabupaten Donggala

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan masih ditemukan adanya faktor yang menghambat implementasi Sistem pelaporan barang milik daerah di Kabupaten Donggala. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pejabat pengelola barang di SKPD Kabupaten Donggala, yang mengemukakan adanya beberapa faktor yang menghambat implementasi Sistem pelaporan barang milik daerah di Kabupaten Donggala, dengan uraian sebagai berikut:

1. SIMDA BMD merupakan sistem komputerisasi, karena sudah banyak yang rusak, maka sering terjadi error pada sistem client maupun pada server yang kadang menghambat aktivitas.
2. Sarana komputerisasi, belum memadai untuk digunakan dalam mengoperasikan SIMDA BMD, selain jumlahnya yang

sangat terbatas, juga barangnya sudah banyak yang rusak sehingga perlu pembaharuan pengadaan sarana prasarana (computer)

3. SDM pengelola barang milik daerah di Kabupaten Donggala rata-rata belum memahami dan terampil dalam menggunakan SIMDA BMD.
4. SDM pengelola barang milik daerah di Kabupaten Donggala rata-rata belum memahami Standar operasional pelaporan barang milik daerah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Sistem pelaporan barang milik daerah di Kabupaten Donggala dilihat dari dimensi komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi belum terimplementasi dengan baik, hanya indikator disposisi dinilai sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian lapangan yang telah dijelaskan pada pembahasan penelitian.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Sistem pelaporan barang milik daerah di Kabupaten Donggala, diantaranya adalah SDM pengelola barang yang tidak terampil menggunakan SIMDA BMD, Sarana pendukung dalam pelaporan barang milik daerah berdasarkan standar administrasi yang ditentukan belum memadai (seperti computer yang sudah banyak yang rusak tidak dapat lagi digunakan), sehingga kalau dipaksakan untuk digunakan maka sering terjadi error pada sistem client maupun pada server yang kadang menghambat aktivitas

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, 2007. Analisis Pengaruh Window Displays Terhadap Keputusan Konsumen Untuk Membeli (Studi Kasus Pada Mall Tatura), *Skripsi*,

- Fakultas Ekonomi, Universitas Tadulako.
- Bajuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono, 2003. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*, FISIP UNDIP, Semarang.
- C. Edward III, George, 1991. *Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Press*, Washington.
- Dasril, Munir, Hendry Arsy Djuanda, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, YP API, Yogyakarta.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, and Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, Bunga Rampai, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Husein, Muhammad Fakhri dan Amin Wibowo, 2009. *Sistem Informasi Manajemen*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jogianto, HM., 2005. *Sistem Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Jones, Rowan, and Pendlebury, 2006. *Public Sector Accounting*, Pitman Publishing, London.
- Kaho, Yosef Riwu, 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Raja Graffindo Persada, Jakarta.
- Kismartini, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Malhotra, Naresh K, 2005. *Riset Pemasaran Pendekatan Terapan*, alih bahasa Soleh Rusyady Maryam, PT. Indeks, Jakarta.
- Mardiasmo, 2005. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan otonomi Daerah 2001*, Seminar Isu terakhir Menjelang Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001. HIMMEP, Yogyakarta.
- N. Dunn, William, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, PT. Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Radianto, Elia, 2007. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi Di Maluku*, Prisma, Vol. IX No.3 24-27.
- Singarimbun, Masri, Effendi, Sofyan, 2007. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Solichin, Abdul Wahab, 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suadi, Arif, 2007. Penelitian Tentang Manfaat Laporan Arus Kas, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.13 No.2.
- Subarsono, A.G., 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R & D, Edisi Revisi*, Cetakan Kelimabelas, Alfabeta, Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2006. *Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi*, Perpod, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogis, 2005. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Wibawa, Samudra, 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Graffindo Persada, Jakarta.
- Wijayanto, 2003. *Sistem Informasi Manajemen*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Winamo, Wing Wahyu, 2004. *Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.